

**PERHITUNGAN INDEKS GINI RATIO DAN
ANALISIS KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2006-2010**

H. Syamsuddin. HM

*Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Jambi*

ABSTRAC

*Kesenjangan distribusi pendapatan merupakan konsekwensi dari suatu pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Hasil studi menunjukkan bahwa Gini ratio selama periode 2006-2010 cenderung meningkat dari 0,288 pada tahun 2006 menjadi 0,321 pada tahun 2010 sehingga ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kategori **sedang**. Kriteria Bank Dunia (*relative inequality*), tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten ini selama lima tahun terakhir tergolong relatif rendah (*low inequality*). Hal ini ditunjukkan kelompok 40 % dari penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati pendapatan rata-rata diatas 20 persen, baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Akan tetapi porsi pendapatan yang diterima golongan penduduk berpendapatan rendah tersebut, secara konsisten semakin menurun, yang berarti tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat selama periode tersebut semakin meningkat.*

Keywords : *Distribution of income, employment and growth.*

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam era ekonomi yang semakin terbuka, ekonomi makin berorientasi pada pasar, peluang dari keterbukaan dan persaingan pasar belum tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah. Kondisi ini harus dicegah sehingga proses kesenjangan tidak semakin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor dan golongan ekonomi yang lebih maju. Perhatian dan keberpihakan harus diberikan kepada pembedayaan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal.

Isu-isu pokok perekonomian makro suatu daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), penyerapan tenaga kerja (*employment*) dan pemerataan yang berkaitan dengan penyediaan jasa umum (*basic public services*). Pertumbuhan ekonomi merefleksikan perkembangan aktifitas perekonomian daerah yang ditandai dengan pergerakan roda ekonomi daerah melalui aktivitas produksi, konsumsi dan investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna manakala dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah daerah pemekaran telah melaksanakan otonomi daerah dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan berbagai aktivitas ekonomi diperlukan suatu pengukuran universal untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam kerangka Otonomi Daerah. Salah satu ukuran yang banyak digunakan adalah seberapa besar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat melalui pembagian pendapatan daerah secara merata.

Gini Ratio merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Indeks Gini ratio dengan asumsi-asumsi tertentu dapat pula dipergunakan untuk bahan analisis perbandingan pembagian pendapatan relatif antar masyarakat dari beberapa negara atau wilayah dan kecenderungan kepincangan pembagian pendapatan antara anggota masyarakat tertentu.

Dalam mengukur distribusi pendapatan, Bank Dunia membagi jumlah penduduk atas tiga kelompok, yaitu kelompok 40 % penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 % penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk yang berpendapatan tinggi. Selanjutnya ketidakmerataan sebaran pendapatan yang menyebabkan pembagian pendapatan dalam keadaan kepincangan yang parah, sedang atau ringan dapat diukur

berdasarkan persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Perhitungan pengukuran distribusi pendapatan yang sangat populer digunakan oleh para ilmuwan dan ekonom dewasa ini adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*), karena perhitungan ini cukup peka untuk menjelaskan hubungan antara kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi dengan kelompok penduduk lainnya. Namun dalam penelitian ini untuk melihat kepincangan distribusi pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir, digunakan kedua pengukuran, yaitu Gini Ratio dan kriteria Bank Dunia, sehingga akan tegambar suatu perbandingan kesenjangan distribusi pendapatan yang mengacu pada keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2006-2010.

1.2. Perumusan Masalah

Otonomi Daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan berbagai aktivitas ekonomi telah berangsur selama sepuluh tahun. Diperlukan suatu pengukuran universal untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan menghitung seberapa besar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat melalui pemabagian pendapatan daerah secara merata. Melalui pendekatan Gini Ratio

diharapkan dapat mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan perhitungan Indeks Gini Ratio dan Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan pada upaya untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan :

1. Karakteristik dan pengeluaran rumah tangga berdasarkan lapangan usaha, pekerjaan utama, kondisi sosial dan pola konsumsi
2. Kondisi kesenjangan distribusi pendapatan berdasarkan perhitungan Koefisien Gini selama priode 2006-2010
3. Kondisi kesenjangan distribusi pendapatan berdasarkan kreteria Bank Dunia selama priode 2006-2010

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Pembagian Pendapatan

Salah satu kritik Marshall (1959) yang sangat keras terhadap David Ricardo dan pengikutnya adalah bahwa dalam pengembangan ilmu ekonomi terdapat kemajuan pesat, tetapi mereka tidak mengindahkan bahwa orang-orang miskin telah menyebabkan kemiskinan. Mereka tidak melihat bahwa kemiskinan adalah penyebab utama dari ketidakefisienan yang kemudian menyebabkan pula kemiskinan kelas

Implikasi dari dana upah yang terkenal dari Lasalle sebagai Iron Law yang kemudian dikembangkan oleh Mill (1976) membuka kemungkinan lebih besar akan kekakuan pembagian pendapatan. Lahirnya *Exhaustion-Theorem* dan *Euler-Theorem* untuk fungsi Cobb-Douglas merupakan pengukuran terhadap pembagian pendapatan fungsional, yaitu mengukur sampai seberapa jauh sumbangan masing-masing sektor terhadap output. Jika output tersebut dibayarkan kepada masing-masing sektor sesuai dengan nilai marginalnya, maka output tersebut tidak ada yang tersisa.

Pengukuran pembagian pendapatan berdasarkan fungsional tersebut terlihat pula dalam model Landreth (1976) yang memperlihatkan hubungan antara sumbangan faktor dengan pertumbuhan dengan memperhitungkan faktor upah dan laba. Pemilik modal telah memberi sumbangan dalam proses produksi dan mendorong pertumbuhan, sehingga ekonomi lebih maju. Laba dijadikan tabungan, tabungan diubah menjadi investasi. Dengan demikian terjadilah pertumbuhan ekonomi yang kemudian menciptakan permintaan.

Alat-alat pengukuran dalam pembagian pendapatan personal tidak saja dapat dipakai untuk mengukur kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sedang dan rendah, tetapi juga dapat dipakai untuk mengamati tingkat kepincangan menurut fungsional, regional dan sektoral. Jadi, pengukuran pembagian pendapatan personal ini dapat digunakan untuk mengukur

tingkat pemerataan atau tingkat kepincangan ketiga kategori pendapatan tersebut. Pengukur kesenjangan dalam kelompok faktor produksi, seperti upah, laba, bunga dan sewa, dapat juga digunakan ukuran-ukuran seperti Koefisien Pareto dapat dihitung dari distribusi upah atau laba yang diperoleh masing-masing faktor produksi.

Selanjutnya, pengukuran tersebut dapat pula digunakan secara sektoral. Kepincangan pembagian pendapatan di sektor pertanian, industri, perdagangan, perhubungan dan jasa-jasa dapat dibandingkan dengan mengukur lebih dahulu kepincangan pendapatan personal secara kelompok. Untuk mengukur tingkat disparitas antar wilayah dalam wilayah itu sendiri akan lebih efektif daripada dengan pengukuran pendapatan perkapita secara keseluruhan. Sampai tahun 1964, Rusia sebagai negara sosialis dengan ekonomi terencana secara sentral yang bercirikan dengan prinsip distribusi, belum mempunyai perhitungan kelompok pendapatan secara personal.

2.2. Perkembangan Teori dan Pengukuran

Konsep pengukuran pendapatan nasional pertama sekali disusun oleh William Petty dalam bukunya *Political Arithmetick* satu abad sebelum terbitnya *Wealth of Nations*. Kemudian penaksiran pendapatan personal yang pertama dilakukan oleh King (1696) dalam Mill (1976), enam tahun setelah buku Petty dipublikasikan. Hasil kerja

keras King telah disajikan distribusi pendapatan personal menurut jenis kelamin, umur dan wilayah serta jabatan/profesi.

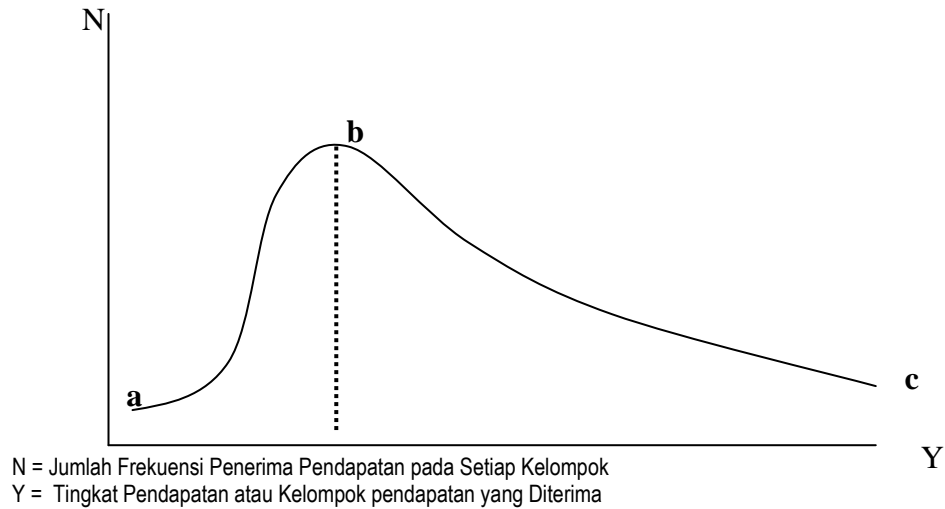
Apa yang disajikan King jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Susenas Indonesia tahun 1964/1965 tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga. Menurut Soltow (1968) di Inggris, data pembahasan pembagian pendapatan personal telah tersedia sejak tahun 1436. Seandainya pada waktu itu Pareto, Lorenz dan Gini menyaksikannya, tentu sudah dapat ditaksir tingkat kepincangan pembagian pendapatan di Negara Inggris. Akan tetapi menjadi pertanyaan mengapa kompilasi tentang pendapatan personal yang sedemikian berharga tidak mendapat perhatian serius dalam perjalanan sejarah pengukuran pendapatan personal.

2.2.1. Hukum Pareto

Eric (1956) berpendapat bahwa Pareto, Marshall, Wieser dan Bohm adalah nama-nama yang tergolong ke dalam Generasi kedua dari kaum Marjinalis. Pareto (1923) dalam Schwier (1971) adalah seorang penulis terakhir dari kelompok generasi kedua. Dia tertarik ilmu ekonomi setelah dua puluh lima tahun berprofesi sebagai insinyur dan merupakan orang pertama yang menerapkan konsep *Indifferent Curve* terhadap dua macam barang yang kemudian lebih dikenal F.Y. Edgeworth.

Disamping teorinya tentang Paretian Optimum, dia telah pula menyusun suatu hukum dalam distribusi pendapatan. Pareto menjelaskan teorinya ini dengan menunjukkan distribusi normal dari fenomena umum kualitas manusia. Dalam mengamati salah satu aspek kualitas manusia, dapat ditentukan rata-rata hitung dan kemudian setiap nilai individu pengamatan akan mempunyai simpangan dari nilai rata-ratanya. Jika semua deviasi (penyimpangan) ini digambarkan, maka akan terbentuk kurva normal yang disebut *Curve of error*.

Gambar 1
Kurva Pembagian Pendapatan
Selalu Melenceng ke Kanan

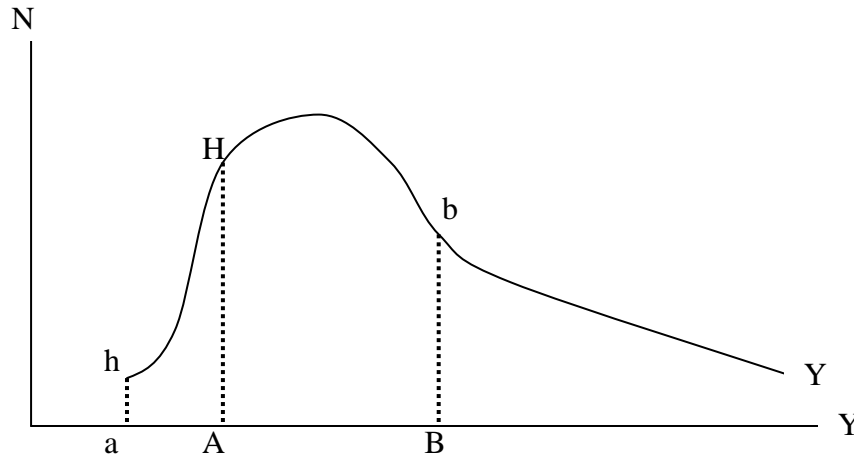


Jika diamati penyimpangan upah dari nilai rata-ratanya, akan terbentuk pula kurva-kesalahan, tetapi tidak simetri. Kurva akan melencong (Pareto menggambarannya dengan vertikal sedemikian rupa, sehingga puncak kurva di sebelah kanan dan melencong ke atas) ke kanan. Demikian juga halnya terhadap pendapatan yang melencong ke kanan (Gambar 1).

Menurut Pareto, manusia ditentukan oleh suatu kolektivitas yang bersifat hairakis. Kurva yang melencong tersebut, bukan kurva kualitas manusia, tetapi fakta lain

yang berhubungan dengan kualitas manusia. Kurva distribusi pendapatan tersebut, sebenarnya pada bagian kiri lebih curam, oleh karena dibatasi pendapatan minimum (terendah) dari variabel pendapatan personal yang diamati, sehingga Gambar 1 berubah menjadi Gambar 2.

Gambar. 2
Kurva Kelompok Pendapatan Pareto



Gambar 2 dibagi atas tiga daerah yang mempunyai implikasi sbb :

1. Garis **ah** adalah batas pendapatan kelompok orang yang mempunyai pendapatan terendah, sehingga bila dihubungkan dengan kebutuhan masih berada di bawah kebutuhan subsisten. Daerah **ahHA** merupakan kelompok penduduk yang sangat miskin dengan tingkat mortalitas tinggi.
2. Penduduk yang bermukim di wilayah **AHbB** mempunyai distribusi pendapatan yang belum begitu cukup tangguh untuk menghadapi perjuangan untuk hidup, sehingga kelompok ini mempunyai tingkat kematian anak-anak yang cukup tinggi.
3. Penduduk yang tinggal di daerah **Bbc**, mempunyai distribusi pendapatan yang relatif baik dan mempunyai daya tahan yang tinggi, sehingga terhindar dari berbagai kelemahan fisik. Bila kelompok atas dan bawah tidak berada dalam kmondisi seimbang, maka akan mengakibatkan terjadinya keresahan sosial.

Penjelasan di atas merupakan gambaran pertama teori Pareto tentang distribusi pendapatan personal. Selanjutnya Pareto menurunkan sebuah hukum pembagian pendapatan yang sangat terkenal sebagai hukum Pareto.

2.2.2. Hukum Gini

Gini atau lebih lengkapnya Corrado Gini adalah seorang ahli statistika Italia yang menganalisis pembagian pendapatan personal dengan peralatan matematis yang rumusnya sering disebut **Hukum Gini** yang dipublikasikan pada tahun 1908. Gini tidak menentukan tingkat pendapatan tertentu, tetapi menghitung tingkat kesenjangan pendapatan personal secara agregatif yang diterima di atas tingkat tertentu. Untuk itu Hukum Gini erat hubungannya dengan Hukum Pareto. Gini dalam Bowman (1974) menentukan jumlah pendapatan yang diterima oleh sejumlah orang $\leq N_h$ $>$. Misalkan jumlah pendapatan

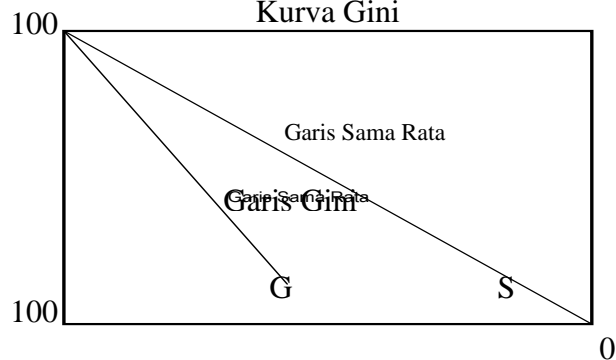
adalah Y , maka Gini membuat fungsi sbb :

$$N_h = By^\beta \text{ atau}$$

$$\text{Log } N_h = \beta \text{ Log } Y$$

Jadi Y adalah jumlah pendapatan agregat di atas y , sedangkan N_h sama dengan jumlah penerima pendapatan. Sementara B merupakan konstanta yang terjadi atas pilihan terhadap unit pengukuran. Sedangkan β adalah kriteria pembagian pendapatan personal. Sebaliknya dari taksiran keefisien Pareto, kalau pendapatan agregat di atas atau sama dengan y turun 1 %, maka jumlah penerima pendapatan akan bertambah β %. Dalam bentuk logaritma linier, kurva Gini dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 2.3.

Gambar 3
Kurva Gini



Perkembangan selanjutnya Hukum Gini sering dihubungkan dengan kurva Lorenz. Koefisien Gini atau bilangan Gini sering dipakai untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan. Angka Gini dapat diturunkan dari berbagai formula. Dari formula Pareto dapat diperoleh angka Gini. Demikian pula angka Gini dapat diperoleh fungsi kepadatan pendapatan (*density function*). Kakwani (1973) mencoba menafsirkan beberapa modifikasi tentang kurva Lorenz dan kemudian dapat pula diturunkan berbagai macam angka Gini.

2.2.3. Ukuran Bank Dunia

Ukuran yang digunakan Bank Dunia sebenarnya tidaklah serumit ukuran-ukuran yang telah dibahas sebelumnya. Pengukuran yang digunakan Bank Dunia tersebut hanya peralatan statistika deskriptif yang sederhana. Dalam statistika deskriptif telah dikenal adanya pengelompokan frekuensi, misalnya dijadikan lima kelompok atau quantile. Secara kumulatif, jika kita mengambil kelompok pertama dari bawah (nilai terendah) quantile, maka diperoleh 20 % penduduk atau penerima pendapatan. Dari 20 % tersebut dihitung jumlah pendapatan mereka dan dibagi dengan pendapatan total, misalnya diperoleh 15 %. Ini berarti 20 % penduduk yang mempunyai pendapatan terendah memperoleh 15 % bagian dari total pendapatan.

Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penetapan sasaran. Siapakah yang perlu mendapat prioritas dalam pembangunan suatu negara. Untuk tujuan-tujuan pemerataan pendapatan, maka kelompok paling bawah atau termiskin perlu mendapat prioritas untuk di tingkatkan pendapatannya. Bila dengan angka Gini Ratio atau Pareto hanya menilai secara makro, tanpa dapat melihat keadaan bagian-bagian anatominya lebih jauh.

Bank Dunia bekerja sama dengan *Institute of Development Studies* menentukan kriteria tentang penggolongan pembagian pendapatan, apakah dalam keadaan kepincangan yang parah, sedang atau ringan. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa (Chenery, 1975):

3. Jika suatu negara mempunyai 40 % penduduk yang berpendapatan terendah dan memperoleh sekitar kurang dari 12 % jumlah pendapatan negara, maka hal tersebut termasuk dalam kepincangan yang tinggi.
4. Bila suatu negara mempunyai 40 % penduduk berpendapatan terendah, tetapi jumlah pendapatan yang diterima antara 12 % -17 % dari seluruh pendapatan negara, maka negara tersebut digolongkan sebagai

1. negara dengan kepincangan sedang.
2. Jika suatu negara mempunyai 40 % penduduk berpendapatan terendah, tetapi jumlah pendapatan yang diterima lebih dari 17 % dari total pendapatan negara, maka kepincangan negara tersebut termasuk rendah.

Dengan adanya ukuran pengelompokan seperti di atas, akan lebih cepat diamati penduduk paling miskin yang perlu mendapat prioritas dalam pembangunan. Dalam menentukan sasaran kelompok, perlu dilakukan identifikasi kelompok, baik secara nasional maupun regional relatif lebih mudah dilakukan. Kemudian dalam membandingkan angka-angka kepincangan pembagian pendapatan, harus lebih teliti, karena cukup banyak faktor yang menentukan tinggi rendahnya angka Gini Ratio. Apalagi ada keinginan untuk membandingkan antara dua kurun waktu. Jika metode dalam pengelolaan datanya tidak sama, akan berakibat salah tafsir terhadap angka-angka Gini Ratio yang dihasilkan.

III. Metode Penelitian

3.1. Data Yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Row Data yang diperoleh dari BPS hasil survei Sosial dan Ekonomi secara nasional (Susenas), namun supaya lebih fokus, data yang diambil hanya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2006-2010. Penelitian dengan metode pustaka (*library research*).

3.2. Responden

Penelitian ini didominasi oleh **Row Data** yang bersumber dari BPS kantor pusat di Jakarta, dengan jumlah responden yang berbeda-beda setiap tahun observasi. Selama periode 2006-2010 jumlah responden Susenas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sbb :

1. Untuk tahun 2006 sebanyak 608 sampel rumah tangga
2. Untuk tahun 2007 sebanyak 608 sampel rumah tangga
3. Untuk tahun 2008 sebanyak 605 sampel rumah tangga
4. Untuk tahun 2009 sebanyak 608 sampel rumah tangga
5. tahun 2010 sebanyak 579 sampel rumah tangga

ukuran besar dan kecil (lihat contoh). *Ketiga*, setelah masyarakat memahami dan mengerti, dicetak uang yang sebenarnya dalam bentuk baru yaitu

3.3. Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), kemudian dianalisis dengan menggunakan metode sbb :

a. Metode Deskriptif

Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran karakteristik rumah tangga, kondisi sosial ekonomi dan pengeluaran rumah tangga di Kabupaten tanjung Jabung Barat periode 2006-2010.

b. Metode Kuantitatif

Metode ini digunakan untuk menghitung koefisien gini (Gini Ratio) yang berkaitan dengan kepincangan distribusi pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui dua pendekatan, yaitu Gini Ratio dan Bank Dunia.

3.4. Alat Analisis Data

Untuk mengetahui level kepincangan distribusi pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2006-2010 digunakan rumus Gini Ratio sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})$$

G = Angka Koefisien Gini (Gini Rasio)

X_i = Persentase kumulatif dari jumlah rumah tangga untuk $i = 1, \dots, n$

Y_i = Persentase kumulatif pendapatan rumah tangga untuk $i = 1, \dots, n$

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Karakteristik dan Pengeluaran Rumah Tangga

Gambaran karakteristik rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada data hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010. Survei ini melibatkan 579 rumah tangga sampel dengan rincian 339 sampel rumah tangga pedesaan dan sebanyak 240 rumah tangga perkotaan. Pembahasan mengenai karakteristik rumah tangga penduduk ini meliputi karakteristik kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga, Lapangan usaha dan status pekerjaan utama kepala rumah tangga, kondisi perumahan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akses anggota rumah tangga terhadap program kemiskinan, pengeluaran rumah tangga dan pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4.1.1. Karakteristik Kepala Rumah Tangga

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional oleh BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa umur rata-rata kepala rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2010, secara rata-rata sekitar 44 tahun, dimana umur kepala rumah tangga di pedesaan dan perkotaan tidak berbeda signifikan.

Akan tetapi porsi kepala rumah tangga di pedesaan yang berjenis kelamin perempuan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, perbedaan tersebut bisa jadi disebabkan karena porsi kepala rumah tangga yang berstatus cerai (terutama cerai mati) di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Dari aspek perkawinan tampak bahwa kepala rumah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar (84,63 %) berstatus kawin, tidak ada perbedaan yang berarti antara mereka yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Namun cerai mati proporsinya jauh lebih besar (10,62 %) di pedesaan dibanding perkotaan. Hal ini diduga karena beratnya pekerjaan kepala rumah tangga di pedesaan tidak sebanding dengan asupan gizi yang masuk, sehingga probalitas terkena berbagai penyakit sangat besar. Sementara kemampuan finansial untuk berobat sangat terbatas.

Dilihat dari aspek jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah di duduki kepala rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa secara rata-rata sekitar separuh dari kepala rumah tangga ini hanya memiliki pengalaman pendidikan pada tingkat SD atau sederajat saja, bahkan terdapat sekitar 6.39 persen kepala rumah tangga tidak pernah bersekolah. Porsi kepala rumah tangga yang hanya memiliki pengalaman sekolah

pada tingkat SD serta yang tidak pernah bersekolah terutama terjadi di wilayah pedesaan yang porsinya mencapai sekitar 56.78 persen dari total kepala rumah tangga di pedesaan.

Karakteristik kepala rumah tangga penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa sekitar 92.57 persen kepala rumah tangga memiliki kemampuan membaca huruf latin, bahkan di wilayah pedesaan, kepala rumah tangga yang memiliki kemampuan membaca huruf latin hanya sekitar 89.38 persen, artinya lebih 10 persen kepala rumah tangga di wilayah pedesaan ini buta huruf. Kemampuan membaca huruf arab juga lebih rendah di wilayah pedesaan di bandingkan di perkotaan.

Selanjutnya dilihat dari aspek lapangan pekerjaan utama menunjukkan bahwa, sebagian besar kepala rumah tangga di daerah ini bekerja di usaha pertanian, khususnya tanaman perkebunan. Secara total porsi kepala rumah tangga berusaha di bidang perkebunan mencapai 42.31 persen. Jenis pekerjaan terbesar berikutnya adalah sektor perdagangan dengan porsi sekitar 12.44 persen dan jasa kemasyarakatan, pemerintah dan perorangan dengan porsi sekitar 10.88 persen.

Dilihat dari status kepala rumah tangga dalam pekerjaan utamanya, tampaknya bahwa di wilayah pedesaan sebagian besar status kepala rumah tangga dalam pekerjaan utamanya sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap dengan porsi mencapai 42.18 persen dari total kepala rumah tangga, kemudian di ikuti status berusaha sendiri dengan porsi sekitar 18.29 persen. Sementara di wilayah perkotaan status kepala rumah tangga dalam pekerjaannya dominan sebagai buruh.karyawan/pegawai dengan porsi mencapai sekitar 37,08 persen kemudian diikuti status berusaha sendiri dengan porsi sekitar 20,0 persen.

Secara total porsi rumah tangga sampel yang memperoleh program beras murah/raskin mencapai sekitar 33,68 persen dari keseluruhan rumah tangga sampel di daerah ini, sedangkan porsi rumah tangga yang memperoleh program kesehatan gratis sekitar 16,06 persen dan yang memperoleh berbagai program kredit usaha adalah sebanyak 13,13 persen.

Perbandingan aksesibilitas rumah tangga perkotaan dan pedesaan terhadap program pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa, porsi rumah tangga perkotaan yang dapat mengakses program pengentasan kemiskinan lebih besar dibandingkan dengan porsi rumah tangga pedesaan.

Jenis program kredit usaha menunjukkan bahwa, setidaknya terdapat sekitar 14.58 persen rumah tangga perkotaan yang menerima program kredit usaha, sementara di pedesaan hanya sekitar 12.09 persen yang memperoleh program kredit usaha ini. Jenis program krediti usaha yang paling banyak di akses rumah tangga di perkotaan adalah PNP Mandiri dengan porsi sekitar 5.83 persen, kemudian di ikuti program Bank selain KUR dengan porsi sekitar 3.33 persen, program koperasi sekitar 2.50 persen dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekitar 1.67 persen.

4.1.2. Pengeluaran Rumah Tangga

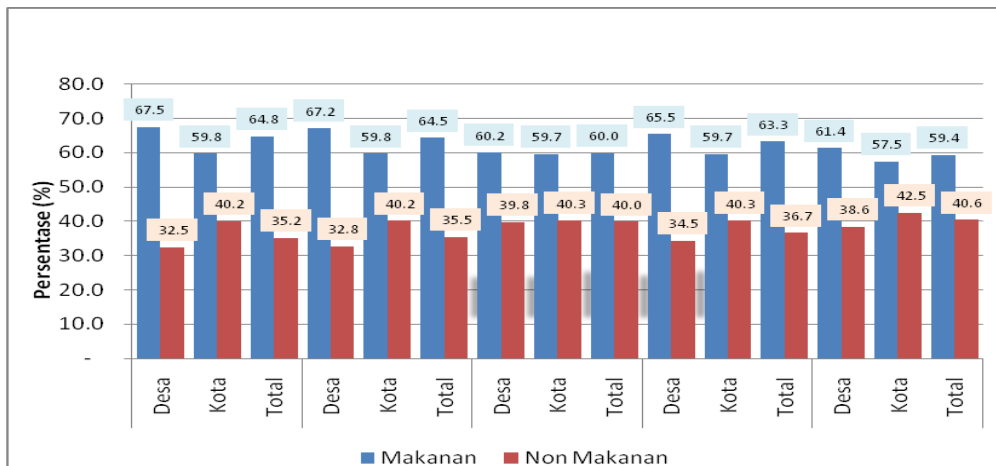
Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan masyarakat di suatu wilayah atau daerah. Berdasarkan hasil survai sosial ekonomi nasional tahun 2006-2010, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah ini cenderung semakin baik.

Perkembangan engeluaran rata-rata rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa selama

periode 2006-2010, rata pengeluaran rumah tangga meningkat hampir dua kali lipat yakni meningkat dari Rp. 1,05 juta per bulan tahun 2006 menjadi sekitar Rp. 1,92 juta per bulan tahun 2010 atau meningkat rata-rata sekitar 18,32 persen per tahun. Laju peningkatan rata-rata pengeluaran rumah tangga ini paling

besar di wilayah perkotaan yakni tumbuh sekitar 19,38 persen per tahun, sedangkan di wilayah pedesaan tumbuh sekitar 16,18 persen per tahun. Perbedaan tersebut lebih disebabkan karena di daerah pedesaan biaya hidup relatif rendah, sehingga pengeluaran lebih kecil.

Gambar. 4
Perkembangan Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2010



Selanjutnya Gambar diatas menunjukkan bahwa porsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan di wilayah perkotaan, sekitar 59.8 persen dan sekitar 40.2 persen untuk non makanan. Pada tahun 2010 berubah menjadi 57.5 persen untuk makanan dan sekitar 42.5 persen untuk non makanan. Penurunan proporsi pengeluaran untuk makanan sebesar 2,3 persen di

daerah perkotaan selama periode 2006-2010 atau turun sekitar 0,46 persen pertahun. Hal ini membutuhkan suatu hipotesis bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar proporsi pengeluaran untuk non makanan, terutama dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan dan wisata.

4.2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Versi Koefisien Gini

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Tingginya ketimpangan pendapatan atau kemiskinan relatif, berarti kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area antara kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna dengan luas area di bawah kurva Lorenz.

Aplikasi rumus Koefisien Gini berikut ini di berikan contoh perhitungan koefisien Gini berdasarkan data SUSENAS mengenai pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2010. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka Koefisien Gini untuk seluruh rumah tangga sampel pada tahun 2010 sebesar 0,3201. Hal ini berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2010 dikategorikan sebagai tingkat “**ketimpangan sedang**”. Hal ini bermakna bahwa dari 579 rumah tangga penerima pendapatan, memperoleh sekitar

32,01 persen dari total pendapatan daerah tahun 2010. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka distribusi pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2010 termasuk kategori ketimpangan sedang.

Hasil perhitungan Koefisien Gini Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2006-2010 menunjukkan bahwa selama periode 2006-2008 Indeks Gini di wilayah pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan dan keseluruhan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2006-2008 distribusi pendapatan di wilayah pedesaan relatif lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Meskipun demikian tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.

Selanjutnya pada periode 2009-2010, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan meningkat dan melampaui tingkat ketimpangan wilayah pedesaan. Selama periode ini distribusi pendapatan di wilayah perkotaan berada dalam tingkat “ketimpangan sedang”. Sementara distribusi pendapatan di wilayah pedesaan pada tahun 2009 tetap berada dalam tingkat **ketimpangan rendah**, namun pada

tahun 2010 menunjukkan peningkatan hingga menyentuh pada level tingkat **ketimpangan sedang**.

Secara total wilayah dalam kurun waktu 2009-2010 kesenjangan distribusi pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada tingkat ketimpangan sedang. Hal ini ditunjukkan oleh angka indeks Gini masing-masing 0,310738 untuk tahun 2009 dan meningkat menjadi 0,320068 pada tahun 2010 atau selama kurun waktu tersebut indeks Gini berada diatas nilai 0,3 (ketimpangan sedang).

4.3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Versi Kriteria Bank Dunia

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan *Gini Ratio* hanya bisa menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum, tetapi tidak mampu menjelaskan seberapa besar porsi yang diterima oleh kelompok berpendapatan rendah/miskin dari keseluruhan pendapatan wilayah. Sehubungan dengan ini, ukuran yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia (*World Bank*) dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex, memberikan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (*inequality*) melalui indikator yang disebut **relative inequality** atau biasa disebut dengan kriteria Bank Dunia. *Relative*

inequality diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat.

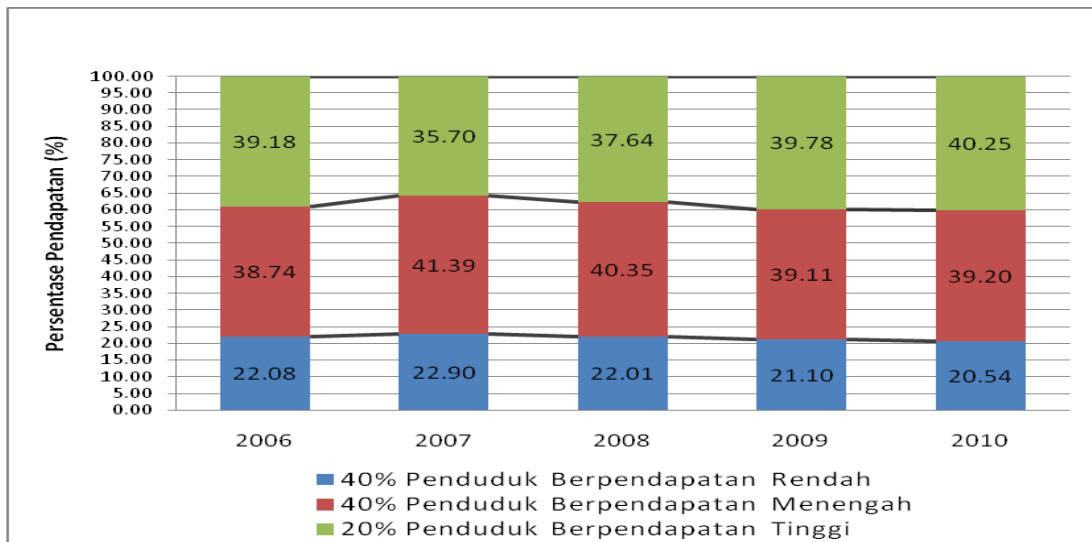
Berdasarkan hasil analisis ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan pendekatan Kriteria Bank Dunia, menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2006 – 2010 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah (*low inequality*). Ini ditunjukkan oleh porsi pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % dari penduduk berpendapatan rendah, berkisar antara 20.54 persen hingga 22.90 persen, yang berarti lebih tinggi dari ambang batas 17 persen pendapatan, dan berada dalam kriteria *low inequality* dalam kriteria Bank dunia.

Dengan mencermati pergeseran porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen kelompok rumah tangga berpendapatan rendah selama periode 2006-2010 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 2006 kelompok ini menikmati sekitar 22,08 persen dari bagian pendapatan regional, kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi 22,90 persen. Sementara tiga tahun berikutnya (2008-2010), porsi pendapatan

yang dinikmati oleh golongan rumah tangga berpendapatan rendah ini semakin menurun. Hal ini berarti bahwa meskipun tingkat ketimpangannya masih dalam kategori rendah, namun dari tahun ketahun menunjukkan kecenderungan peningkatan

ketimpangan pendapatan masyarakat. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, bila ada keinginan untuk menurunkan proporsi penduduk miskin dimasa depan.

Gambar 5
Distribusi Pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Tahun 2006-2010



Sumber : Diolah dari Susenas Tahun 2006-2010

Kenyataannya bahwa porsi pendapatan yang diterima golongan 40 persen rumah tangga berpendapatan rendah ini di wilayah pedesaan berkisar antara 21,37 persen hingga 22,58 persen, sedangkan di wilayah perkotaan berkisar antara 20,85 persen

dhingga 23,83 persen. Akan tetapi porsi pendapatan yang diterima oleh golongan berpendapatan rendah ini dari tahun ke tahun cenderung menurun, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.

Masalah ketimpangan antar wilayah akan selalu menjadi perhatian dan menarik untuk diamati, karena kecenderungan konsentrasi spasial selalu terjadi. Tabel 4.10 berikut ini menyajikan dua ukuran ketimpangan, yaitu criteria World Bank dan Gini Ratio. Dengan criteria World Bank secara umum tidak terlihat adanya ketimpangan pendapatan, hal ini ditunjukkan oleh persentase pendapatan kelompok 40 % terendah yang berada di atas 17 %. Namun cenderung menurun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 (22,90 – 20,54).

Kondisi yang sama diperlihatkan oleh koefisien Gini yang menunjukkan ketimpangan yang semakin meningkat dari Tahun 2007 sampai dengan 2010. Hal ini ditunjukkan Koefisien Gini dari 0,257 pada tahun 2007 dan terus meningkat hingga mencapai 0,320 pada tahun 2010. Berarti secara total kedua ukuran ini memberikan hasil dengan kecenderungan yang hampir sama, yaitu sejak tahun 2007 ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Tanjug Jabung Barat selama periode 2006-2010 cenderung meningkat, namun masih pada level yang rendah. Tetapi ukuran Gini Ratio periode 2009 – 2010 berada pada level sedang.

Untuk wilayah pedesaan kedua ukuran ketimpangan ini hampir tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti, namun Koefisien Gini cenderung fluktuatif dan tetap pada level ketimpangan pendapatan yang rendah. Untuk wilayah perkotaan, kedua ukuran sama-sama berfluktuatif, namun ukuran Gini Ratio levelnya bergeser pada posisi *Sedang* yang dimulai pada tahun 2009 sampai dengan 2010. Walaupun hasil kedua pengukuran tersebut menunjukkan ketimpangan yang rendah dan sedang serta berada dalam posisi yang belum menghawatirkan, namun indikasi kecenderungannya selama periode 2006-2010 perlu diwaspadai.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sekitar 42,31 persen pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah di subsektor perkebunan dengan kondisi sosial ekonomi relatif baik, hal ini tergambar dari pengeluaran rumah tangga secara rata-rata mencapai Rp 1,9 juta perbulan yang disertai dengan

pergeseran pola konsumsi dari 64,80 persen pengeluaran untuk makanan pada tahun 2006 bergeser menjadi 59,45 persen pada tahun 2010.

2. Angka Gini ratio selama periode 2006-2008 berada dibawah nilai 0,3. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan masyarakat pada periode tersebut **rendah**. Namun pada periode 2009-2010 angka Gini ratio lebih besar dari 0,3 ($> 0,3$) sehingga ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kategori **sedang**.
3. Menurut Kriteria Bank Dunia (*relative inequality*), tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir (tahun 2006-2010) tergolong relatif rendah (*low inequality*). Hal ini ditunjukkan oleh kelompok 40 % dari penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati pendapatan rata-rata diatas 20 persen, baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan.

5.2. Saran-Saran

1. Studi menemukan bahwa pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (air bersih, kondisi rumah, akses terhadap pelayanan kesehatan dan raskin masih relatif rendah. Perlu pemetaan dengan data yang valid, sehingga arah kebijakan pemerintah dalam tepat sasaran.
2. Ketimpangan yang cenderung meningkat, terutama dua tahun terakhir (2009-2010) harus diwaspadai. Perlu suatu rumusan kebijakan lokal untuk meredam laju peningkatan besaran koefisien Gini Ratio.
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata cukup tinggi dan merupakan kabupaten terkaya kedua setelah TanjabTim, namun disertai dengan angka kemiskinan yang tinggi. Berarti telah terjadi kebocoran wilayah. Perlu penelusuran disektor mana kebocoran itu,..?, berapa besar dan kebijakan apa yang perlu segera dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowman, Mary Jean. 1974. "A Graphical of Personal Income Distribution The United States. American Economic Review.
- Chenery, Hollis, et.al. 1978. *Redistribution With Growth*. Oxford University Press, London.
- Esmara, Hendra. 1977. *Pertumbuhan Ekonomi, Pembagian Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Jawa-Madura 1967-1976*. Lembaga Penelitian Ekonomi Regional FE Univesitas Andalas. Padang
- Esmara, Hendra. 1979. *Perkiraan Pembagian Pendapatan di Indonesia*. Lembaga Penelitian Ekonomi Regional FE Univesitas Andalas. Padang
- Hasibuan, Nuriman. 1981. *Pertumbuhan dan Pembagian Pendapatan Masyarakat Indonesia*. Pascasarjana FE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Hasibuan, Nurimansjah. 1993. *Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi. Teori dan Kebijakan*. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Kakwani and N. Podder. "On The Estimation of Lorenz Curves From Grouped Observations". *International Economic Review*. 14 hal. 278-291.
- Landreth, Harry. 1976. *History of Economic Theory*, Houghton Mifflin Company. Boston.
- Marshall, Alfred. 1959. *Principle of Economics*, Cetak Ulang, Macmillan, London.
- Mill, John Stuart. 1976. *Principle of Political Economy*, August M. Kelly, New York
- Salim, Emil. 1983. *Kualitas Kependudukan dan Kebijakan Pemerataan. Pidato Pada Upacara Lustrum/Dies Natalis ke-30 FE*. Sriwijaya, Palembang